MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jend.A Yani Kav 58 Lantai 9-10 Jakarta 10510 PO.BOX 10510
Telepon (021) 29079177 (Hunting) Faximile (021) 29079208 - 29079205
Website : http.ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1270 /Djmt.1/B/OT.01/VIII/2022 Jakarta, 24 Agustus 2022
Lampiran : 3 (Tiga)
Hal : Permohonan data Pelaporan Aksi HAM B08 Tahun 2022 .

Kepada Yth :
Kepala Biro Hukum Perencanaan dan Organisasi
Mahkamah Agung RI.

Di-
Jakarta

Sehubungan surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI Nomor : 7206/Bua.1/OT.01.1/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022, perihal Permohonan Data Pelaporan Aksi HAM B08 Tahun 2022.

Dengan ini kami sampaikan Data Pelaporan Aksi HAM B08 Tahun 2022 terkait langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara khusus mengenai pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara .

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

ACH JUFRI

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer;
3. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor : 1270 /Djmt.1/B/OT.01/VIII/2022
Tanggal : 31 Agustus 2022

DATA PELAPORAN AKSI HAM B08 TAHUN 2022
KEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

No.	Uraian	Keterangan
1.	Satker Pengadilan :	
	Bahwa Peradilan Militer membawahi 23 Satuan Kerja yang terdiri dari : 1) 4 Pengadilan Tingkat Banding a. Pengadilan Militer Utama b. Pengadilan Militer Tinggi I Medan c. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta d. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Untuk Sarana dan Prasarana Disabilitas pada Pengadilan Militer sudah ada akan tetapi belum sesuai dengan standar
	1) Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh 2) Pengadilan Militer I-02 Medan 3) Pengadilan Militer I-03 Padang 4) Pengadilan Militer I-04 Palembang 5) Pengadilan Militer I-05 Pontianak 6) Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin 7) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 8) Pengadilan Militer II-08 Jakarta 9) Pengadilan Militer II-09 Bandung 10) Pengadilan Militer II-10 Semarang 11) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 12) Pengadilan Militer III-12 Surabaya 13) Pengadilan Militer III-13 Madiun 14) Pengadilan Militer III-14 Denpasar 15) Pengadilan Militer III-15 Kupang 16) Pengadilan Militer III-16 Makassar 17) Pengadilan Militer III-17 Manado 18) Pengadilan Militer III-18 Ambon 19) Pengadilan Militer III-19 Jayapura	Untuk Sarana dan Prasarana Disabilitas pada Pengadilan Tingkat Pertama sudah ada akan tetapi belum sesuai dengan standar (Kecuali Dilmil II-09 Bandung dan Dilmil II-11 Yogyakarta)
2.	Sarana dan Prasana Disabilitas :	
	1) *Guiding block* atau ubin pemandu	Sebagian besar Pengadilan Militer belum ada *Guiding block* untuk ke dalam dan didalam ruang sidang
	2) *Warning block* atau ubin peringatan	Belum ada
	3) *Ramp*/bidang landai	Hampir 90% pada satker pengadilan sudah ada *Ramp*/bidang landai akan tetapi belum sesuai dengan standar
	4) Akses masuk kedalam ke gedung pengadilan sudah ada dan untuk lebar akses pintu masuk ke dalam ruang sidang minimal 90 meter	Sudah ada akan tetapi masih ada yang belum sesuai dengan standar
	5) Tempat penyimpanan Kursi Roda	90% sudah tersedia
	6) Lahan parkir penyandang disabilitas	90% sudah tersedia
	7) Kursi tunggu khusus penyandang disabilitas	90% sudah tersedia
	8) Toilet khusus penyandang disabilitas dengan di lengkapi dengan *panic button*	90% sudah tersedia akan tetapi belum semua sesuai dengan standar seperti luas toilet dan belum semua menggunakan pintu geser serta belum dilengkapi denga *panic button*
	9) *Handrail*	sudah tersedia akan tetapi masih belum sesuai dengan standar
	10) Kursi tunggu khusus penyandang disabilitas.	90% sudah tersedia
	11) Kruk	Belum tersedia
	12) *Walker* (Alat Bantu Jalan 4 Kaki)	Belum tersedia

3.	Pelatihan yang telah dilaksanakan :	
	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer pernah memberikan Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer dengan Narasumber dari Kementrian PUPR, Pusat Rehabilitasi Kementrian Pertahanan dan PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia)	Untuk pelakasanaan kegiatan Bimtek selanjutnya perlu adanya kerjasama dengan Yayasan SAPDA Jogyakarta
4.	Monitoring :	
	Salah satu cara memantu sarana dan prasarana pelayanan bagi kaum disabilitas di Peradilan Militer dengan melakukan kegiatan :	
	1. Monitoring Pelayanan Peradilan Pada tahun 2022 melakukan monitoring pada 6 Satker Pengadilan Militer : a) Pengadilan Militer Tinggi I Medan b) Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh c) Pengadilan Militer I-04 Palembang d) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan e) Pengadilan Militer III-14 Denpasar f) Pengadilan Militer III-15 Kupang	Untuk Sarana dan Prasarana Disabilitas pada Pengadilan Militer sudah sudah ada akan tetapi belum sesuai dengan standar
	2. Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu pada 7 Satker pada tahun 2022 : a) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya b) Pengadilan Militer I-05 Pontianak c) Pengadilan Militer II-08 Jakarta d) Pengadilan Militer II-09 Bandung e) Pengadilan Militer II-10 Semarang f) Pengadilan Militer III-12 Surabaya g) Pengadilan Militer III-18 Ambon	Untuk Sarana dan Prasarana Disabilitas pada Pengadilan Militer sudah sudah ada akan tetapi belum sesuai dengan standar

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
di Lingkungan Peradilan Militer
Tahun 2022

No.	Nama Pengadilan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TW 1	TW 2	Smt 1	TW 3	TW 4	Smt 2	TOTAL
1	Dilmiltama	0	0	0	0	2	0	0	0					0	2	2	0	0	0	2
2	Dilmilti I Medan	1	0	2	0	0	3	4	0					3	3	6	4	0	4	10
3	Dilmil I - 01 Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	0	2					0	0	0	2	0	2	2
4	Dilmil I - 02 Medan	4	2	3	5	1	1	3	2					9	7	16	5	0	5	21
5	Dilmil I - 03 Padang	8	3	1	0	4	1	2	3					12	5	17	5	0	5	22
6	Dilmil I - 04 Palembang	6	1	1	2	2	2	3	1					8	6	14	4	0	4	18
7	Dilmil I - 05 Pontianak	3	0	0	0	1	0	0	1					3	1	4	1	0	1	5
8	Dilmil I - 06 Banjarmasin	1	0	0	0	0	0	2	1					1	0	1	3	0	3	4
9	Dilmil I - 07 Balikpapan	1	0	3	4	0	3	0	2					4	7	11	2	0	2	13
10	Dilmilti II Jakarta	13	1	3	2	0	0	9	4					17	2	19	13	0	13	32
11	Dilmil II - 08 Jakarta	6	4	3	4	4	5	1	6					13	13	26	7	0	7	33
12	Dilmil II - 09 Bandung	15	1	7	9	2	3	6	4					23	14	37	10	0	10	47
13	Dilmil II - 10 Semarang	2	1	4	5	0	2	1	2					7	7	14	3	0	3	17
14	Dilmil II - 11 Yogyakarta	3	1	0	2	0	0	0	0					4	2	6	0	0	0	6
15	Dilmilti III Surabaya	3	0	2	3	0	3	0	2					5	6	11	2	0	2	13
16	Dilmil III - 12 Surabaya	7	7	8	7	4	1	2	11					22	12	34	13	0	13	47
17	Dilmil III - 13 Madiun	2	3	3	3	1	2	1	1					8	6	14	2	0	2	16
18	Dilmil III - 14 Denpasar	1	0	0	0	3	1	1	1					1	4	5	2	0	2	7
19	Dilmil III - 15 Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
20	Dilmil III - 16 Makassar	7	2	0	3	12	1	6	5					9	16	25	11	0	11	36
21	Dilmil III - 17 Manado	4	2	1	1	1	0	3	2					7	2	9	5	0	5	14
22	Dilmil III - 18 Ambon	1	3	2	0	1	0	5	1					6	1	7	6	0	6	13
23	Dilmil III - 19 Jayapura	4	0	0	3	1	1	0	0					4	5	9	0	0	0	9
24	**Peradilan Militer Indonesia**	**92**	**31**	**43**	**53**	**39**	**29**	**49**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166**	**121**	**287**	**100**	**0**	**100**	**387**

Lampiran : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor : 1270 /Djmt.1/B/OT.01/VIII/2022
Tanggal : 31 Agustus 2022

DATA PELAPORAN AKSI HAM B08 TAHUN 2022
KEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

No.	Uraian	Keterangan
1.	Satker Pengadilan :	
	Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara membawahi 34 Satuan Kerja yang terdiri dari : 2) 4 Pengadilan Tingkat Banding a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	Untuk Sarana dan Prasarana Disabilitas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara belum tersedia
	3) 30 Pengadilan Tingkat Pertama 1) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 2) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 3) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 4) Pengadilan Tata Usaha Negara Pakanbaru 5) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 6) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi 7) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu 8) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung 9) Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang 10) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang 11) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 12) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 13) Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 14) Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak 15) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 16) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya 17) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 18) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 19) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 20) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 21) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 22) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 23) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram 24) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 25) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari 26) Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 27) Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 28) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon 29) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 30) Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	Untuk Sarana dan Prasarana Disabilitas pada Pengadilan Tingkat Pertama sudah sudah ada akan tetapi belum sesuai dengan standar
2.	Sarana dan Prasana Disabilitas :	
	1) *Guiding block* atau ubin pemandu	Hampir 90% pada satker pengadilan sudah ada *Guiding block* mulai dari tempat parkir sampai dengan ruang PTSP sedangakan : 1. *Guiding block* untuk ke dalam dan didalam ruang sidang belum ada 2. Untuk Sarana dan Prasarana Disabilitas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara belum tersedia untuk ke Toilet 3. *Guiding block* dari Pintu gerbang/pintu utama

		halaman sampai dengan PTSP masih ada yang belum tersedia
	2) *Warning block* atau ubin peringatan	Sudah ada
	3) *Ramp*/bidang landai	Hampir 90% pada satker pengadilan sudah ada *Ramp*/bidang landai akan tetapi belum sesuai dengan standar
	4) Akses masuk kedalam kegedung pengadilan sudah ada dan untuk lebar akses pintu masuk ke dalam ruang sidang minimal 90 meter	Sudah ada akan tetapi masih ada yang belum sesuai dengan standar
	5) Tempat penyimpanan Kursi Roda	90% sudah tersedia
	6) Lahan parkir penyandang disabilitas	90% sudah tersedia
	7) Kursi tunggu khusus penyandang disabilitas	90% sudah tersedia
	8) Toilet khusus penyandang disabilitas dengan di lengkapi dengan *panic button*	90% sudah tersedia akan tetapi belum semua sesuai dengan standar seperti luas toilet dan belum semua menggunakan pintu geser serta belum dilengkapi denga *panic button*
	9) *Handrail*	sudah tersedia akan tetapi masih belum sesuai dengan standar
	10) Kursi tunggu khusus penyandang disabilitas	90% sudah tersedia
	11) Kruk	100% sudah tersedia
	12) *Walker* (Alat Bantu Jalan 4 Kaki)	90% sudah tersedia
	13) Kursi tunggu khusus penyandang disabilitas	90% sudah tersedia
3.	Pelatihan yang telah dilaksanakan :	
	1) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemberian Layanan terhadap Penyandang Disabilitas di Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan selama 14 kali pertemuan mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan 10 Juli 2022, untuk setiap kali pertemua 2 s.d 3 Jam (Online) Dikuti oleh seluruh satker pengadilan yang terdiri dari Sekretarsi, Panitera, Panitera Muda Petugas PTSP, Petugas Security dll 2) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemberian Layanan terhadap penyandang Disabilitas di Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan di Hotel Melleium Jakarta pada tanggal 27 s/d 29 Oktober 2021 diikut oleh Panitera Muda dan Petugas PTSP (*Blended*) 3) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemberian Layanan terhadap Penyandang Disabilitas di Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan selama 14 kali pertemuan mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan 10 Juli 2022, untuk setiap kali pertemuan 2 s.d. 3 Jam (Online) Diikuti oleh seluruh satker pengadilan yang terdiri dari Sekretaris, Panitera, Panitera Muda Petugas PTSP, Petugas Security dll Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemberi Layanan terhadap penyandang Disabilitas di Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan di Hotel Millenium Jakarta pada tanggal 27 s/d 29 Oktober 2021 diikuti oleh Panitera Muda dan Petugas PTSP (*Blended*)	Untuk pelakasanaan kegiatan Bimtek tersebut untuk hasilnya kurang maksimal karena didalam prakteknya tidak dapat dilaksanakan secara langsung karena tidak dapat berinteraksi langsung dengan Narasumber
4.	Monitoring :	
	Salah satu cara memantau sarana dan prasarana pelayanan bagi kaum disabilitas di Peradilan Tara Usaha Negara dengan melakukan kegiatan :	
	1. Monitroning Pelayanan Peradilan Pada tahun 2022 melakukan monitoring pada 7 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara : a) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang b) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar c) Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	a) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum ada sarana dan prasarana disaibiltas dikarenakan

	d) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda e) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Lampung f) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang	bentuk Gedung belum standar sesuai dengan *prototype* b) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sarana dan prasarana disaibiltas sudah ada akan tetapi belum lengkap terutama *guiding block* belum sampai kedalam ruang sidang c) Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sarana dan prasarana disaibiltas sudah ada akan tetapi belum lengkap terutama Guiding block belum sampai kedalam ruang sidang d) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda e) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Lampung sarana dan prasarana disaibiltas sudah ada akan tetapi belum lengkap terutama *guiding block* belum sampai kedalam ruang sidang f) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang sarana dan prasarana disaibiltas sudah ada
	2. Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu pada 7 Satker pada tahun 2022 : a) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta d) Pengadilan Tata Usaha Negara T. Pinang e) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh f) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar g) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya h) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	a) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya belum tersedia b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan belum tersedia c) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum tersedia d) Pengadilan Tata Usaha Negara T. Pinang suda ada e) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum ada sarana dan prasarana disaibiltas dikarenakan bentuk Gedung belum standar sesuai dengan *prototype* g) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sarana dan prasarana disaibiltas sudah ada akan tetapi belum lengkap terutama *guiding block* belum sampai kedalam ruang sidang h) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sarana dan prasarana disaibiltas sudah ada akan tetapi belum lengkap terutama *guiding block* belum sampai kedalam ruang sidang i) Pengadilan Tata Usaha Negara jambi sarana dan prasarana disaibiltas sudah ada akan tetapi belum lengkap terutama *guiding block* belum sampai kedalam ruang sidang